

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR & PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Suatu konsep penelaahan atau pengkajian terhadap berbagai literatur atau sumber kepustakaan yang diarahkan untuk menemukan pegangan atau landasan teoritik yang kuat serta memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan perkataan lain, melakukan kajian pustaka berarti melakukan penelaahan secara mendalam mengenai berbagai istilah, fakta, definisi, konsep, variabel, proposisi sampai pada teori yang dianggap dapat dijadikan pegangan untuk mengungkap fenomena atau permasalahan yang akan dikaji.

2.1.1 Konsep Administrasi .

1. Administrasi Dalam Arti Sempit

Silalahi dalam bukunya *Studi tentang Ilmu Administrasi (2013 : 5)*, administrasi dalam arti sempit, yaitu :

“Penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain”

Atmosudirjo dikutip oleh **Silalahi** dalam bukunya *Studi tentang Ilmu Administrasi (2013 : 5)* mengemukakan bahwa : **“Tatausaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian (*the handling*) informasi”**.

Wajong dikutip oleh **Silalahi** dalam bukunya *Studi Ilmu Administrasi (2013 : 5)* Mengemukakan bahwa : **“Kegiatan Administrasi meliputi pekerjaan tatausaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan”**

Mufiz dikutip oleh Silalahi dalam bukunya *Studi Ilmu Administrasi* (2013

: 6) Mengemukakan bahwa :

“Administrasi berarti tatausaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, yang bersifat teknis ketatausahaan.

2. Administrasi Dalam Arti Luas

Silalahi dalam bukunya *Studi tentang ilmu Administrasi* (2013 : 11), administrasi secara luas yaitu :

“Kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagian ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya – sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”

Gie yang dikutip oleh Mariane dalam bukunya *Human Relations* (2017 : 114) mengemukakan bahwa : **“Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu”**

Siagian yang dikutip oleh Mariane dalam bukunya *Human Relations* (2017 : 113) mengemukakan bahwa :

“Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya”

Pfiffner yang dikutip oleh **Mariane** dalam bukunya *Human Relations* (2017 : 112) mengemukakan bahwa : **“Administrasi dapat di definisikan sebagai mengorganisasikan dan menggerakkan sumber daya manusia dan materil untuk mencapai tujuan yang diinginkan”**

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Administrasi secara luas adalah kegiatan kerjasama dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja dengan mendayagunakan sumber – sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu

3. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik menurut **Gordon** yang dikutip oleh **Syafiie** dalam bukunya *Ilmu Administrasi Publik* (2010 : 25), sebagai berikut :

“Administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif, serta pengadilan.”

Edward yang dikutip oleh **Syafiie** dalam bukunya *Ilmu administrasi Publik* (2010 : 25) administrasi publik yaitu :

“Administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.”

Waldo yang dikutip dari **Syafiie** dalam bukunya *Ilmu Administrasi Publik* (2010 : 25) mengemukakan bahwa : **“Administrasi publik adakah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”**

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam sebuah organisasi publik dalam memenuhi kebutuhan publik.

2.1.2 Organisasi

Farland yang dikutip oleh **Mariane** dalam bukunya *Human Relations* yang (2017 : 100) mendefinisikan : **“organisasi ialah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal dan menyumbangkan usahanya terhadap pencapaian tujuan”**

Siagian yang dikutip oleh **Silalahi** dalam bukunya *Studi tentang Ilmu Administrasi* (2013 : 124) mengemukakan bahwa :

“Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai sesuatu untuk tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan”.

Waldo yang dikutip oleh **Silalahi** dalam bukunya *Studi tentang Ilmu Administrasi* (2013 : 124) mengemukakan bahwa : **“Organisasi adalah struktur hubungan – hubungan diantara orang – orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi”**

Toha yang dikutip oleh **Silalahi** dalam bukunya *Studi tentang Ilmu Administrasi* (2013 : 125) mengemukakan bahwa : **“organisasi sebagai sistem kegiatan yang terkordinir secara sadar atau kekuatan dari dua manusia atau lebih”**

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Organisasi adalah sekelompok orang atau pengelompokan orang – orang yang melakukan interaksi berdasarkan pembagian kerja dan otoritas yang tersusun secara hirarkis dalam suatu struktur untuk mencapai tujuan.

2.1.3 Manajemen

Pfiffner yang dikutip oleh **Mariane** dalam bukunya *human relations* (2017 : 88) mendefinisikan :

“management is concerned with the direction of these individuals and fucion to achive ends previously determined (manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan)”

Siagian yang dikutip oleh **Mariane** dalam bukunya *human relations* (2017 : 88) mendefinisikan : **“manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”**

Toha yang dikutip oleh **Silalahi** dalam bukunya *Studi tentang Ilmu Administrasi* (2013 : 136) mengemukakan bahwa :**“aktivitas menggerakkan segenap orang dan mengarahkan semua fasilitas yang dipunyai oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”**

Siagian yang dikutip oleh **Silalahi** dalam bukunya *Studi tentang Ilmu Administrasi* (2013 : 137) mengemukakan bahwa : **“manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan – kegiatan orang lain”**

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Manajemen merupakan sekumpulan proses untuk meraih tujuan pada organisasi melalui kerjasama.

2.1.4 Pengambilan Keputusan

Baron yang dikutip oleh **Jamaludin** dalam bukunya *Teori Pengambilan Keputusan kualitatif dan kuantitatif (2018 :2)* mengemukakan bahwa :

“pengambilan keputusan adalah suatu proses terjadinya identifikasi masalah, menetapkan tujuan pemecahan, pembuatan keputusan awal, pengembangan dan penelitian alternatif – alternatif, serta pemilihan salah satu alternatif yang kemudian dilaksanakan dan ditindaklanjuti”.

Stoner yang dikutip oleh **Jamaludin** dalam bukunya *Teori Pengambilan Keputusan kualitatif dan kuantitatif (2018:3)* mengemukakan bahwa :

“pengambilan keputusan adalah proses pemilihan suatu arah tindakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu”

Siagian yang dikutip oleh **Jamaludin** dalam bukunya *Teori Pengambilan Keputusan kualitatif dan kuantitatif (2018:4)* mengemukakan bahwa :

“Pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta – fakta dan data. Penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Pengambilan Keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah.

2.1.5 Konsep Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Dye yang dikutip oleh **Agustino** dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2014 : 7) mengemukakan bahwa, kebijakan publik adalah : **“apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”**.

Friedrich yang dikutip oleh **Agustino** dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2014 : 7) mengemukakan kebijakan public sebagai berikut :

“Kebijakan publik adalah serabgkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”

Chandler dan **Plano** yang dikutip oleh **Tangkilisan** dalam bukunya *Implementasi Kebijakan Publik* (2003 : 12) mengemukakan bahwa :

“Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber – sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan”.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan guna memecahkan masalah publik atau demi kepentingan publik dalam rangka mencapai suatu tujuan.

2. Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses – proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik.

Tahap – tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang diangkat dan dipilih menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan – alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah – masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Dalam perumusan kebijakan masing – masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing – masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan – badan administrasi maupun agen – agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit – unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran – ukuran atau kriteria – kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.1.6 Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh **Agustino** dalam bukunya *Dasar-dasar kebijakan publik (2012 : 139)* mendefinisikan :

“implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Agustino dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2012 : 139)* mendefinisikan :

“Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.”

Tachjan dalam bukunya *Implementasi Kebijakan Publik* (2006 : 56) mendefinisikan : **“Implementasi kebijakan ialah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah adanya kebijakan yang sudah disetujui.”**

Van metter dan Van horn dalam bukunya *Agustino* (2006:13) mendefinisikan :

“implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Menurut **Rian Nugroho D.** Pada prinsipnya ada empat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan dalam bukunya *public policy, teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan* (2014:686), adalah sebagai berikut:

a. Tepat Kebijakan

Adalah ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauhmana kebijakan yang telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellent is the policy*. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

b. Tepat Pelaksanaannya

Adalah faktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang menjadi pelaksana yaitu, pemerintah, kerjasama antara pemerintah /masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang di swastakan, kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bisa memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan,sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mmengarahkan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau dimana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan insdustri-industri berkala menengah dan kecil yang tidak strategis, senaiknya diserahkan kepada masyarakat.

c. Tepat Target

Adalah ketepatan dengan berkenaan dengan tiga hal, pertam, apakah target yang di intervensi sesuai yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmonis dan apakah kondisi target dan kondisi mendukung atau menolak. Sosialisasi kebijakan dikawasan konflik tidaklah salah, namun pada prinsipnya

mengulang kebijakana lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

d. Tapat Lingkungan

Adalah ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal yaitu yang disebut oleh Calista sebagai variabel eksogen yang terdiri dari *publik opinion* yaitu presepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. *Intrepetative Instutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dari masyarakat, seperti media massa, kelompok penekanan, dan kelompok kepentingan dalam mengintrepretasikan ebijakan dan *individuals* yakni individu-individutertent yang mampu memainkan peran penting dalam mengintrepretasikan kebijakan da mengimplementasikan kebijakan.

e. Tepat Proses

Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses yaitu:

1. *Policy Acceptance*, disini publik memahami sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintahmemahami sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
2. *Policy Adaption*, disini publik menerima sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah meneria sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

3. *Strategic Rediness*, disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrat *on the street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu pelaksanaan/penerapan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu, kelompok pemerintah, dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan.

2. Model Implementasi

1). Model George C. Edward III

Teori implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh **Edward III** dalam **Agustino (2016:136-141)** menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

(i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan

dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan).

Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk
- c. yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- d. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam-melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- e. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan

mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan' sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil

- c. Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung

kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-todays politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2). Model Van Metter & Van Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh **Van Metter & Van Horn** dalam **Agustino (2016 : 133)** disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara

sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara

apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas

cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahankesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud

termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

3). Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut **Mazmanian** dan **Sabatier** dalam **Subarsono (2015:94-99)**, ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*);
- (2) Karakteristik kebijakan undang-undang (*ability of statute to structure implementation*);
- (3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Karakteristik Masalah:

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan memengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.

Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Karakteristik kebijakan:

1. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis. Kebijakan yang memiliki dasar teoretis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.

4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-Negara Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.
7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

Lingkungan kebijakan:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif,.
3. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain:
 - (1) Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan;
 - (2) Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.
4. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut

4). Model Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut **Grindle** dalam **Subarsono, (2011: 93)** dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel

tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan **Wibawa** dalam **Wibawa dkk (1994: 22-23)** mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

5). Teori David L Weimer dan Aidan R.Vinning

Dikutip dalam Subarsono pandangan Weimer Dan Vining (1999:396) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program, yakni : (1) logika kebijakan, (2) lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, (3) kemampuan implementor kebijakan.

1. Logika dari suatu kebijakan ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang diterapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
3. Kemampuan implementor keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

2.2 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis mengenai implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Hal tersebut dilatar belakangi oleh masalah sumber daya manusia dan adanya hambatan berupa ketersediaan lahan dan anggaran sehingga dalam implementasi program pengembangan ruang terbuka hijau di Kawasan Kecamatan Rancaekek belum optimal.

Implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dalam prosesnya tidak terlepas dari adanya permasalahan dalam mencapai tujuannya. Sehubungan dengan fenomena Kawasan Rancaekek yang sekarang Pengembangannya dipegang oleh Pemerintah Daerah. Tentu bukan hal yang mudah bagi Pemerintah Daerah sebagai implementor juga *leading sector* untuk menghadapi permasalahan yang ada. Implementasi merupakan sebuah tindakan tindak lanjut yang terdiri dari berbagai macam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, karena terdapat berbagai tantangan maupun permasalahan yang harus dihadapi dalam prosesnya.

Banyak ahli yang mengemukakan teori mengenai implementasi kebijakan atau program, namun teori yang dikemukakan oleh **David L. Weimer dan Aidan R. Vinning** mengenai tiga kelompok variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program merupakan teori yang tepat dalam penelitian ini.

Adanya alasan penulis memilih teori yang dikemukakan oleh David L. Weimer dan Aidan R. Vinning adalah karena tiga kelompok variabel besar yang dikemukakan dalam teori tersebut merupakan variabel yang mendasar dan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rancaekek. Tiga Variabel yang dikemukakan oleh **David L. Weimer dan Aidan R. Vinning** dianggap sederhana dan mengandung aspek yang tepat yang harus diperhatikan pada saat melaksanakan sebuah program.

Teori yang dikemukakan oleh **David L. Weimer dan Aidan R. Vinning** yang dikutip oleh **Subarsono** dalam bukunya *Analisis Kebijakan Publik* (2013:103-104) mengenai tiga kelompok variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program :

1. Logika Kebijakan

“Sebuah program dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Program yang dibentuk harus masuk akal (reasonable) dan mendapatkan dukungan teoritis.”

Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan variabel logika kebijakan yang penulis rumuskan :

- a. Program Rasional
- b. Memerhatikan berbagai aspek
- c. Permasalahan yang mendasar
- d. Tujuan dan manfaat yang diinginkan

2. Lingkungan Tempat Kebijakan di Operasikan

“Sebuah program dilaksanakan dengan melihat pada kondisi lingkungan yang ada baik lingkungan fisik, ekonomi, hankam, social dan politik.”

Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan variabel kondisi lingkungan tempat kebijakan dioperasikan yang penulis rumuskan :

- a. Aturan Hukum dan SOP
- b. Instansi/lembaga/pihak lain yang terkait
- c. Faktor pendukung dan penghambat

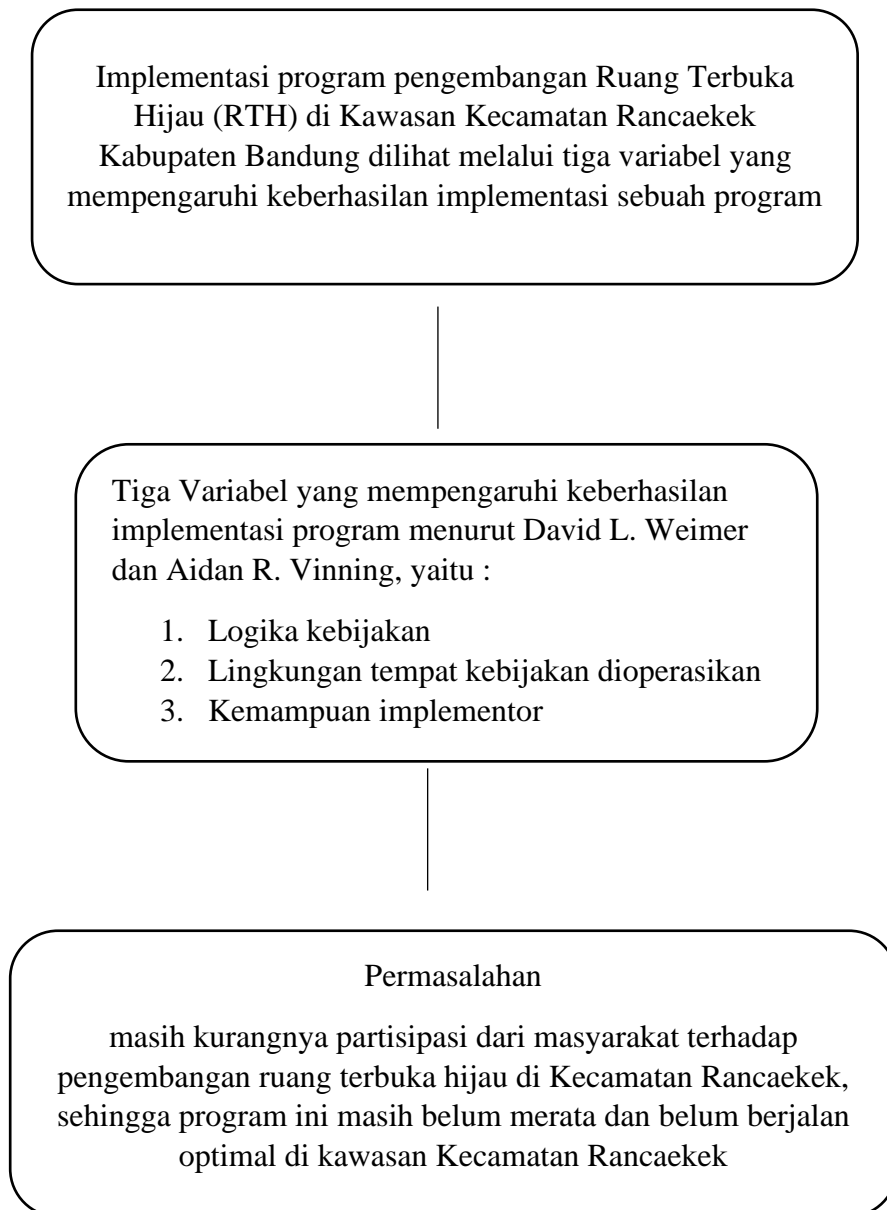
3. Kemampuan Implementor

“Implementor dituntut untuk memiliki karakteristik dan kapabilitas sebagai pelaksana program yang mencakup pada tingkat kompetensi dan keterampilan implementor dalam merealisasikan tujuan dari program yang telah ditetapkan.”

Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan variabel kemampuan implementor yang penulis rumuskan :

- a. Pemahaman tujuan dan proses pelaksanaan
- b. Sumber daya manusia
- c. Komunikasi dan koordinasi

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : Modifikasi berdasarkan teori ahli dan LAKIP 2017

2.3 Proposisi

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis mengajukan proposisi sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung ini akan berjalan secara optimal apabila menggunakan teori yang di kemukakan oleh David El Weimer dan Aidan R Vinning. sebab belum berjalan optimalnya suatu kebijakan ini dapat dilihat melalui tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah program yaitu logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor dimana kebijakan ini diuji dan dianalisis oleh penulis untuk melihat sejauh mana kebijakan ini terimplementasi dilapangan”